
PERDAGANGAN BEBAS MELALUI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI SULAWESI TENGAH

Sulfitri Husain

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako,
Palu-Indonesia

Email: sulfitrih@gmail.com

Abstract: *The ASEAN Economic Community (AEC) is still ongoing, for Indonesia, especially Middle Sulawesi, the formation of an integrated economic area in Southeast Asia is an opportunity as well as an obstacle that must be faced. From the aspect of opportunity, AEC makes everything easier, including more open economic activities and various opportunities with a free trade platform. However, from another aspect, the lack of quality human resources and inadequate infrastructure are obstacles for middle Sulawesi which is still improving. From these two aspects, this study aims to determine the extent of the opportunities and obstacles faced by middle Sulawesi in dealing with free trade through the ASEAN Economic Community (AEC). This paper uses a descriptive qualitative method. Secondary data is used as the basis for descriptive analysis. The results of this study indicate that middle Sulawesi has the opportunity to conduct free trade by looking at its strategic geographical location and abundant natural resources. However, in addition to the opportunities it has, this province also has several obstacles which of course must receive attention for the sake of sustainable development while strengthening the competitiveness of Central Sulawesi Province. The next agenda that must be carried out by the government is to pay attention to and improve the factors that become obstacles to free trade, especially from several prioritized sectors including human resources and infrastructure.*

Keywords: *Policy; Free trade; AEC*

Abstrak: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masih berlangsung, bagi Indonesia khususnya Sulawesi Tengah, pembentukan kawasan ekonomi terpadu di Asia Tenggara merupakan peluang sekaligus kendala yang harus dihadapi. Dari aspek peluang, MEA mempermudah segalanya, termasuk kegiatan ekonomi yang lebih terbuka dan berbagai peluang dengan platform perdagangan bebas. Namun dari sisi lain, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala bagi Sulawesi Tengah yang masih terus berbenah. Dari kedua aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peluang dan hambatan yang dihadapi Sulawesi Tengah dalam menghadapi perdagangan bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Makalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data sekunder digunakan sebagai dasar analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki peluang untuk melakukan perdagangan bebas dengan melihat letak geografisnya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Namun selain peluang yang dimiliki, provinsi ini juga memiliki beberapa kendala yang tentunya harus mendapat perhatian demi pembangunan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing Provinsi Sulawesi Tengah. Agenda selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah memperhatikan dan memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penghambat perdagangan bebas, terutama dari beberapa sektor prioritas antara lain sumber daya manusia dan infrastruktur.

Kata Kunci: Kebijakan; Perdagangan bebas; MEA

PENDAHULUAN

Free trade atau perdagangan bebas merupakan sistem perekonomian dunia yang mengantarkan seluruh negara bersaing dalam melakukan perdagangan. Bagi negara maju atau negara yang sudah siap, perdagangan bebas bukan lagi hambatan, melainkan akses untuk mendapatkan segalanya sekaligus memperbaiki pembangunan melalui ekonomi. Bagi negara miskin dan negara berkembang menganggap perdagangan bebas merupakan sistem yang harus dihadapi walau dianggap suatu ancaman dan masih jauh dari kesiapan dalam melakukan *free trade* ini.

Siap atau tidaknya suatu negara, kenyataan ini harus dihadapi. Perdagangan bebas ada dan nyata. Melalui *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan organisasi internasional dan dianggap memiliki peran penting dalam menangani perdagangan internasional. Sekaligus lembaga yang membuat segala aturan-aturan perdagangan internasional termasuk pelaksanaan *Free trade*. Dalam pelaksanaannya *free trade* diagendakan dalam waktu yang berbeda. Bagi negara-negara maju seperti Amerika tentunya telah siap dari segala aspek termasuk kesiapan Sumber Daya Manusi (SDM), sehingga *free trade* telah berlangsung sejak 2010. Sementara bagi negara berkembang perdagangan bebas telah terlaksana sejak 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Arah perdagangan yang kian liberal menjadikan tiap negara mengupayakan forum-forum kerjasama baik bentuknya bilateral, regional, hingga multilateral. NAFTA (*North Amerika Free Trade Area*), merupakan salah satu forum kerjasama perdagangan yang beranggotakan Amerika, Canada, dan Meksiko mencoba menerapkan perdagangan bebas tersebut. Sementara di kawasan Asia Tenggara ada MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang merupakan komunitas negara-negara Asean yang tentunya Indonesia terlibat juga mencoba peruntungan dalam *free trade*.

Melalui MEA bagi salah satu provinsi yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah, *free trade* menimbulkan peluang dan hambatan. Di satu sisi, dengan adanya MEA khususnya di sektor perdagangan, keikutsertaan Sulawesi Tengah yang masih tergolong lambat dalam perkembangannya akan memberi manfaat bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi kedepannya serta dapat mengambil potensi lain ataupun peluang dari *free trade*. Sulawesi Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi terluas ke dua setelah provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 61.841,29 km², provinsi yang beribukotakan Palu ini memiliki potensi wilayah dari sektor pertanian dan perkebunan yang terdiri dari: beras dan jagung, serta komoditi unggulan berupa biji kakao, kelapa sawit dan karet (Arfan, 2011a). Dari sektor perikanan dan kelautan, yang menjadi potensi unggulan dan dapat dikembangkan antara lain: rumput laut, tuna, taripang, udang, kerapu, lajang dan cakalang (Arfan, 2011b). Sementara dari sektor pertambangan dan energy, provinsi dengan jumlah 12 kabupaten ini memiliki sumber daya galian dan mineral sebagai berikut: bahan galian golongan A (strategis) antara lain minyak Dan gas bumi, batu bara dan nikel. Bahan galian golongan B (vital) terdiri dari belerang, tembaga, emas, molibdenum, dan chromit. Bahan galian golongan C (marmer, sirtukil, granit, pasir besi, pasir kuarsa, lempung) (Arfan, 2011c). Selain dari beberapa sektor di atas, masih banyak potensi lain yang akan menghantarkan provinsi ini kearah yang lebih baik, pariwisata misalnya.

Disisi lain, yang kurang menguntungkan bahkan menjadi ancaman dengan adanya *free trade* melalui MEA tidak lain dari segi infrastruktur yang masih belum memadai, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar yang

tentunya berdampak bagi kesejahteraan penduduk, belum lagi dari segi sumber daya manusia yang dianggap kurang kompetitif, serta iklim investasi yang belum kondusif. Maka dari persoalan yang dihadapi tersebut sehingga dalam penelitian ini akan membahas peluang dan hambatan yang dihadapi Sulawesi Tengah menghadapi perdagangan bebas (*free trade*) melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)?.

TINJAUAN PUSATAKA

a. Kebijakan pemerintah dan *Free Trade* (Perdagangan Bebas)

Kebijakan atau biasa disebut sebagai aturan. Memiliki pengertian yang begitu luas tergantung kebijakan apa yang dimaksud, seperti kebijakan ekonomi Indonesia, kebijakan pendidikan Nasional, kebijakan impor dan ekspor (dewi, 2016), juga termasuk didalamnya kebijakan mengenai perdagangan bebas. Dalam membuat suatu kebijakan juga melibatkan beberapa aktor mulai dari masyarakat, swasta, hingga ke level pemeritahan. Aktor-aktor ini saling bekerjasama dalam membuat hingga menjalankan fungsi terhadap pemberlakuan kebijakan yang telah disepakati. Pengertian Kebijakan menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino dalam (Taufiqurakhman, 2014) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan dan beberapa kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sementara menurut Thomas R. Dye, kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Dewi, 2016). Sementara kebijakan yang terkait dangan perdagangan Internasional terdiri dari: Tarif yang merupakan pajak terhadap barang-barang yang masuk di didalam negeri atau biasa disebut 1). tarif impor, 2). subsidi ekspor dalam hal ini

pembayaran yang dilakukan terhadap barang yang dijual keluar negeri baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun, 3). Pembatasan impor yang bertujuan membatasi jumlah barang yang boleh diimpor, 4). Pengekangan Ekspor Sukarela atau yang biasa disebut *Voluntary Restraint Agreement* merupakan bentuk lain dari pembatasan impor. Bagi Negara pengimpor selalu lebih mahal dibandingkan dengan tariff yang membatasi impor dengan jumlah yang sama, 5). Persyaratan Kandungan Lokal, 6). Subsidi kredit ekspor, merupakan pinjaman yang di subsidi kepada pembeli dengan memberikan pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor, 7). Pengendalian Pemerintah, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan secara ketat terhadap pembeli untuk membeli produk dalam negeri kendati harganya lebih mahal disbanding dengan barang impor, 8). dan yang terakhir adalah Hambatan Birokrasi (“Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional,” 2018).

Kerjasama perdagangan MEA yang telah terbentuk akan dimanfaatkan oleh negara-negara anggota yang merupakan komunitas negara-negara ASEAN. Indonesia termasuk di dalamnya bersama beberapa negara diantaranya Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam untuk memasuki perdagangan bebas. Jika dikaitkan dari berbagai pendekatan yang telah ada, pendekatan liberal berasumsi bahwa segala tindakan perekonomian di negara-negara di dunia tidak akan berjalan lancar jika kekuatan politik terus mendominasi dan mengatur mekanisme pasar. Hal ini diperjelas

lagi oleh Adam Smith,¹ yang menurutnya, negara tidak akan makmur jika hanya menumpuk emas, perak, dan barang berharga lainnya. Akan tetapi dibutuhkan kerjasama dan interaksi secara bebas dan terbuka dalam mencari keuntungan (Hadiwinata, 2002). Interaksi yang dimaksud ini tentulah hubungan kerjasama antara negara yang satu dengan negara-negara lainnya. Terlepas negara itu masih tergolong negara berkembang atau negara maju sekalipun. Sementara bagi paham yang kurang mendukung dengan adanya perdagangan bebas beranjak dari asumsi bahwa sebaiknya dilakukan kebijakan untuk memproteksi agar menghindari kerugian yang lebih banyak dari pada mengharap keuntungan yang hasilnya jauh sedikit. Selanjutnya bahwa kebijakan proteksionisme pada kondisi tertentu akan membawa dampak yang lebih baik bagi negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia (Arifin et al., 2004).

Proteksionisme dipahami sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengupayakan atau merumuskan kebijakan ekonomi sedemikian rupa dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari dominasi produk-produk asing.² Selanjutnya Alexander Hamilton³ yang merupakan salah satu pencetus agar negara melakukan proteksionisme. Menurutnya, negara tidak hanya aktif dalam mengembangkan sistem produksi, tetapi juga negara harus mampu dalam mengatasi berbagai persoalan khususnya didalam sistem perdagangan internasional. Hal ini tentunya untuk menghindari jangan sampai merugikan kepentingan Nasional (Hadiwinata, 2002).

Selanjutnya menurut Hamilton dalam (Hadiwinata, 2002) ada 4 rekomendasi yang diajukan ,antara lain:

1. *Protection Duties*, negara harus menerapkan tarif impor bagi produk-produk asing yang dapat mengancam industri dalam negeri. Khususnya bagi industri manufaktur yang diproduksi oleh negara pesaing
2. *Prohibitions of Rival Articles*, negara harus berani melakukan pelarangan impor bagi produk-produk negara pesaing, dengan tujuan industri dalam negeri tetap hidup
3. *Prohibition of the Exportation of Materials of Manufactures*, negara harus mampu melakukan pelarangan ekspor produk manufaktur, kebijakan ini untuk menghemat dan membatasi masuknya negara lain untuk terlibat dalam produk tertentu.
4. *Judicious Regulations for the Inspection of Manufactured Commodities*, negara hendaknya menerapkan peraturan hukum yang mengatur pengecekan komoditas manufaktur. Tentunya dengan tujuan mengharapkan kualitas produk dan menghindari penyelundupan.

Walaupun ke 4 rekomendasi yang diajukan oleh Hamilton sejatinya untuk negaranya sendiri yakni Amerika Serikat yang sudah tergolong negara maju. Barangkali tidak salah jika Indonesia sebagai negara berkembang juga mengikuti rekomendasi tersebut. Amerika sebagai negara maju masih diberi rekomendasi untuk melindungi kepentingan nasionalnya, sehingga tidak membuka secara keseluruhan sistem perekonomiannya kepada dunia Internasional.

Demi memperkuat daya saing, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat serta mengawasi perdagangan bebas yang

¹ Salah satu tokoh liberalism dalam bidang ekonomi yang terkenal dengan teori ekonomi *laissez faire*-ekonomi pasar bebas yang tidak menghendaki campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

² Bob Sugeng Hadiwinata. POLITIK BISNIS INTERNASIONAL, (hal: 57)

³ Seorang tokoh ekonom dan anggota kongres di Amerika Serikat (1755-1804)

akan berlangsung sejak penandatanganan Desember 2015 lalu. Setiap Negara yang ada memiliki ketergantungan, terlebih Indonesia yang masih digolongkan sebagai Negara berkembang tentu sangat tergantung dengan Negara lain terkhusus dengan Negara-negara anggota MEA. Sebaliknya, Negara lain pun memiliki ketergantungan dengan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati.

Dengan adanya indikasi ketergantungan tersebut, melalui Inpres pemerintah menunjuk 4 kementerian guna melakukan pengawasan, diantaranya: Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan 1 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ke 5 lembaga ini memiliki fungsi dan tujuan masing-masing yang telah di atur agar kepentingan dalam negeri dapat bersaing dan terlindungi dalam merespon perdagangan bebas.

b. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

ASEAN Economic Community (AEC) atau di Indonesia lebih sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentukan komunitas ASEAN khususnya dalam bidang ekonomi. Melalui MEA diharapkan stabilitas perekonomian yang ada di Asia Tenggara dapat terwujud, khususnya bagi Indonesia sehingga memiliki posisi strategis dan menjadi salah satu Negara yang mampu bersinergi di kancah internasional.

Terbentuknya MEA diawali ketika beberapa pemimpin dan perwakilan pejabat pemerintahan menghadiri *anniversary* ASEAN yang ke 40 di Singapura pada 20 November 2007 lalu yang kemudian menyepakati piagam ASEAN (Fadli, 2014). *ASEAN charter* ini memuat kesepakatan bersama dalam bidang ekonomi yang memberi jaminan dan saling bekerja sama yang tertuang dalam Bab 1, pasal 1 butir 4, 5 dan 6 yang berisi (“piagam ASEAN,” n.d.):

“4). *To ensure that the peoples and*

Member States of ASEAN live in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious environment; 5). To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital; 6). To alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN through mutual assistance and cooperation.”

Melalui kesepakatan diatas tersebut sangat jelas bahwa Negara-negara anggota harus bekerjasama dalam keberlanjutan pembangunan yang senantiasa berdampingan secara adil dan harmonis. Diakibatkan perekonomian dunia yang semakin terintegrasi dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara faktual mengenai kebijakan pemerintah Sulawesi Tengah dalam melihat peluang dan hambatan terkait perdagangan bebas (*free trade*) melalui Masyarakat Ekonomi Asean atau yang selanjutnya disingkat dengan MEA. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi (pengamatan langsung), wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif (*interactive of analysis*). Langkah yang digunakan dalam analisis data ini selanjutnya adalah pengolahan data yang sudah tersedia dengan cara menganalisisnya terlebih dahulu, mendeskripsikan data, hingga akhirnya menghasilkan

kesimpulan. Menurut Mc Cusker, K., & Gunaydin, metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (*what*)”, “bagaimana (*how*)”, atau “mengapa (*why*)” atas suatu fenomena (Ardianto, 2019). Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lokus dalam penelitian ini. Provinsi yang memiliki luas wilayah 61.841 km² dengan jumlah penduduk sekitar 3.222.241 jiwa ini dianggap memiliki peluang terlibat dalam MEA, sekaligus masih memiliki berbagai hambatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberlakuan MEA

Era baru perdagangan sementara dimulai. Negara-negara dunia saling berkompetisi melakukan perdagangan bebas dan membentuk blok-blok perdagangan. Ada yang wujudnya bilateral seperti kerjasama Singapura dan Amerika Serikat, atau kerjasama yang dilakukan oleh Singapura dan Australia, juga yang bentuknya regional misalnya NAFTA (*North Amerika Free Trade Area*) yang beranggotakan Amerika, Canada, dan Meksiko. Juga MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang keanggotaannya tentu berasal dari Negara-negara ASEAN yang memiliki harapan dapat mewujudkan visi ASEAN:

“Menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara - negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, makmur, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020.”

MEA 2015 sendiri didasari oleh 4 pilar yakni: (i) ASEAN sebagai pasar tunggal dan Basis Produksi, (ii) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, (iii) ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi merata dan berimbang, dan (iv) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global (*Empat Pilar MEA*, t.t.) (“MEA 2015 Resmi Berlaku dan ASEAN Sepakati Lima Pilar

Era Baru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025,” n.d.). komitmen ini kemudian ditindak lanjuti dengan *blue print* MEA 2025 yang terdiri dari 5 pilar, yaitu: (a) ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh; (b) ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis; (c) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; (d) ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan (e) ASEAN yang global (“MEA 2015 Resmi Berlaku dan ASEAN Sepakati Lima Pilar Era Baru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025,” n.d.). Komitmen ini lah yang kemudian dijadikan dasar oleh Negara-negara anggotanya untuk menjalankan dan menghadapi berbagai rintangan perdagangan bebas kedepannya.

Indonesia sebagai Negara kesatuan dengan letaknya yang begitu strategis diantara 2 benua yakni Asia dan Australia, serta 2 Samudera Hindia dan Pasifik menjadikan pemerintah yang ada di pusat tidak dapat memainkan perannya sendiri untuk menghadapi arus perdagangan bebas yang kian terbuka. Untuk itulah, arti penting pemerintahan yang ada di daerah di beri kewenangan dan kebijakan untuk dapat bersinergi menghadapi pasar bebas melalui MEA. Bukan tanpa alasan, namun terkait perdagangan ini juga telah di atur dalam Undang-undang sehingga daerah-daerah yang melakukan perdagangan memiliki Kontrol untuk tidak melepas begitu saja aset yang dimiliki. Perdagangan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sementara dalam skala nasional, perdagangan merupakan penopang terwujudnya pembangunan yang merata dalam suatu wilayah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dibuat untuk melindungi produk yang ada di dalam negeri akibat impor besar-besaran yang akan masuk ke Indonesia. Sehingga melalui UU ini pemerintah di

wajibkan mengendalikan ketersediaan bahan-bahan yang menjadi kebutuhan pokok tanpa terkecuali di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. UU ini juga menetapkan bahasa Indonesia yang harus di gunakan oleh perusahaan dalam pelabelan setiap produknya, serta perizinan mengenai pembatasan dan larangan barang dan jasa (Wangke, 2014).

Bahwa sesungguhnya melalui ketetapan ini akan melindungi komoditas unggulan, produk baik barang maupun jasa yang dimiliki setiap daerah. Adapun yang menjadi kriteria produk unggulan menurut Tambunan dan Nasution diantaranya: (1) memiliki pasar yang luas, (2) memiliki ciri khas yang dimiliki daerah, (3) menyesuaikan kondisi serta potensi yang ada di daerah, (4) memperhatikan penggunaan bahan baku lokal, (5) volume produksi yang cukup besar dan terus menerus, (6) dapat memacu perkembangan komoditas yang lain, (7) memiliki daya saing, (8) memberi peluang tenaga kerja yang terampil dan cukup, dan (9) sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat (Susilo, 2010). Ketika ke 9 indikator ini terpenuhi tidak menutup kemungkinan daerah ini akan menjadi lebih berkembang dari sebelumnya sehingga berkompetensi di perdagangan bebas yang kian terbuka.

Peluang Sulawesi Tengah dalam MEA

Sejak komitmen pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di berlakukan 31 Desember 2015, Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus di upayakan dalam pelaksanaannya. Melalui cetak Biru MEA yang tertuang diatas oleh pemerintah dijadikan landasan dalam menjalankan *free trade*. Memasuki tahun ke 4 sejak pemberlakuan MEA, Sulawesi Tengah mengambil peran sebagai salah satu provinsi yang membuka akses perdagangan global dengan mempertimbangkan beberapa potensi daerah yang dimiliki. Potensi ini kemudian tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota diantaranya; kabupten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan,

Donggala, Buol, Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Parigi Moutong, Toli-toli, Tojo Una-Una dan Palu sebagai kota administrative Provinsi ini. Daerah-daerah tersebut melalui potensi yang dimiliki saling bersinergi dalam mengupayakan pasar terintegrasi global.

Jika disanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Prov. Sulawesi Tengah masih tertinggal. Namun bukanlah halangan bagi provinsi ini untuk terus melakukan pengembangan. Setidaknya, melalui hasil dari ekspor keberlanjutan pembangunan dapat tercapai sehingga provinsi ini dapat bersinergi dengan Negara lain. Dibuktikan melalui kerjasama perdagangan Luar Negeri yang hingga saat ini masih terjalin. Tidak kurang lebih dari 10 Negara menjadi tujuan ekspornya. 5 Negara diantaranya menjadi prioritas ekspor; Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan Jepang, dan Singapura.

Adapun potensi ekspor yang dimiliki berupa sumber daya alam migas dan non migas. Sumber daya alam non migas mulai dari komoditi perikanan hingga perkebunan antara lain; Ikan dan udang, buah-buahan, lak, getah, dan damar, lemak dan minyak hewan/nabati, serat tekstil dan benang, minyak mentah, minyak atsiri, dan kayu. sedangkan sumber daya migas dapat dilihat dari sektor pertambangan yang terdiri dari 3 macam golongan antara lain;1). Golongan A (nikel dan batu bara, gas bumi, dan minyak), 2). Golongan B (tembaga, emas, belerang, dan molybdenum,), 3). Golongan C (granit, pasir besi, marmer, dan lain-lain). Diantara ke 3 golongan tersebut, golongan A merupakan potensi yang cukup besar sebab Negara Tiongkok dan Jepang merupakan tempat di ekspornya hasil tambang tersebut.

Tiongkok merupakan prioritas utama ekspor senilai US\$ 1.919,55 juta. Korea Selatan menduduki urutan ke 2 dengan nilai ekspor mencapai US\$

825, 93 juta. Di urutan ke 3 adalah Taiwan senilai US\$ 809,20 juta. Malaysia menduduki urutan ke 4 sebesar US\$ 153,31 juta, dan Vietnam senilai US\$ 149,34 juta. Sementara sekitar US\$ 83,42 juta ekspor dilakukan dengan Negara lainnya (“Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah,” 2018). Ekspor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Negara Tujuan Ekspor Prov. Sulawesi Tengah 2017-2018

Negara Tujuan	2017 (million US\$)	2018 (million US\$)
Jepang	623,45	711,28
Korea Selatan	333,00	825,93
Taiwan	86,50	809,20
Tiongkok	1 757,24	1 919,55
Singapura	49,32	55,03
Malaysia	23,75	153,31
Vietnam	0,08	149,34
India	0,00	89,16
Amerika Serikat	67,27	131,56
Italia	0,00	115,72
Jumlah	2.940,61	4.960,08
Negara lain	57,20	83,42

Sumber: data BPS, 2018 (diolah peneliti, 2019)

Dari data di atas menunjukkan bahwa Prov. Sul-Teg memiliki peran penting terhadap Negara lain sekaligus menjadi peluang untuk terlaksananya *free trade*.

Peluang lain yang dimiliki sekaligus menjadi ciri khas daerah ini adalah dari segi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), salah satu diantaranya adalah produksi bawang goreng khas Palu yang memiliki tekstur garing dan renyah berhasil memenuhi permintaan Negara Belanda, Dubai dan Hongkong. Raja Bawang yang merupakan salah satu UKM yang ada di kota Palu telah mendapat lisensi standar mutu ISO 9001 dari Badan Standar Nasional Indonesia (BSN) (Nadjemuddin, 2017).

Tantangan Sulawesi Tengah dalam MEA

Selain potensi yang dimiliki, tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala sekaligus menjadi tantangan yang

harus di lalui oleh Sulawesi Tengah. Setidaknya ada 2 tantangan yakni eksternal dan internal yang harus dihadapi sekaligus. Kendala eksternal dapat dilihat dari semakin tinggi dan ketatnya tingkat persaingan di level internasional, kemampuan untuk menarik investor yang semakin sulit didapatkan, serta defisit neraca perdagangan yang terus meningkat (Mantau, 2016). Ketika pengeluaran lebih tinggi dari pada pemasukan, hal ini akan mengakibatkan menipisnya anggaran sebab akan membiayai permintaan impor. Ini dapat dilihat pada tabel peningkatan Ekpor-Import secara Nasional dari tahun 2014-2018 (“Neraca Perdagangan Indonesia Total,” 2019) sebagai berikut:

Tabel 2
Ekpor-Import Secara Nasional dari Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Total dalam (Juta US\$)
I	EKS POR	175.9 80,0	150.3 66,3	145.1 86,2	168.8 28,2	180.0 12,7	820.3 73.4
	-MIGAS	30.01 8,8	18.57 4,4	13.10 5,5	15.74 4,3	17.171 ,7	94.61 4.7
I	-NON MIGAS	145.9 61,2	131.7 91,9	132.0 80,8	153.0 83,9	162.8 40,9	725.7 58.7
	IMP OR	178.1 78,8	142.6 94,8	135.6 52,9	156.9 85,6	188.7 11,2	802.2 23.3
I	-MIGAS	43.45 9,9	24.61 3,2	18.73 9,3	24.31 6,0	29.86 8,4	140.9 96.8
	-NON MIGAS	134.7 18,9	118.0 81,6	116.9 13,6	132.6 69,5	158.8 42,8	661.2 26.4

Sumber: kementerian Perdagangan Indonesia, 2019 (diolah peneliti, 2019)

Dari tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2014 impor secara nasional senilai 178.178,8 Juta US\$ sedikit lebih tinggi dibanding ekspor yang jumlahnya hanya mencapai 175.980,0 Juta US\$. Sementara di tahun berikutnya 2015, 2016, dan 2017 ekspor Indonesia mengalami peningkatan dibanding jumlah impor. Akan tetapi pada 2018, impor kembali mengalami peningkatan sejumlah 188.711,7 dan ekspor berada di bawah dengan nilai US\$ 180.012,7 juta.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014-2017 (“Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka 2018,” 2018), produksi tanaman perkebunan dari beberapa komoditas

unggulan yang ada di wilayah dan juga termasuk komoditas ekspor ini mengalami penurunan produksi.

Tabel 3
Produksi Tanaman Perkebunan dari Beberapa Komoditas pada 2014-2017

Tahun	Kelapa		Kopi		Cengkeh		Kakao	
	Luas lahan/ha	Produksi/Ton						
2014	213 881	190 568,00	8 373	3 572,00	56 554	16 444,00	291 445	208 485,00
2015	213 587	167 172,07	8 466	3 070,49	67 545	14 691,56	288 986	146 507,06
2016	215 450	184 486,51	8 644	2 927,38	68 162	17 171,36	289 194	168 733,90
2017	218 144	187 404,30	8 630	2 647,60	71 454	5 314,10	285 783	134 322,50

Sumber: BPS (Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka 2018), olah data penulis 2019

Dapat dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa produksi kelapa, kopi, Cengkeh, dan Kakao sejak 2014 hingga 2017 mengalami penurunan. Produksi Kelapa pada tahun 2014 sebesar 190.568,00 ton, mengalami penurunan pada tahun 2017 senilai 187.404,30 ton. Ditahun yang sama komoditi Kopi yang tadinya dapat memproduksi 3.572,00 ton pertahunnya turun menjadi 2.647,60, cengkeh sebesar 16.444,00 turun hingga 5 314,10, dan kakao senilai 208.485,00 di tahun 2017 hanya dapat memproduksi sekitar 134.322,50 ton/tahunnya. Artinya, jika impor barang dibanding ekspor dari tahun ketahun terus meningkat akan menjadikan pangsa pasar dalam negeri akan dikuasai oleh asing.

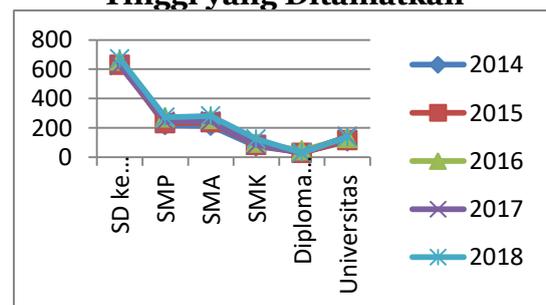
Selain hambatan eksternal tentunya juga dipengaruhi oleh hambatan internal yang berasal dari daerah itu sendiri. Terdapat banyak hambatan yang sifatnya internal, beberapa diantaranya adalah dari segi infrastruktur, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengangguran.

Agar pembangunan berlangsung dengan baik, maka infrastruktur haruslah dibenahi. Hal ini merupakan tantangan besar khususnya bagi pemerintah, pembenahan infrastruktur jalan yang masih kurang memadai, jaringan komunikasi, pasokan listrik yang masih kurang menyebabkan sering terjadinya pemadaman bergilir merupakan dimensi

yang harus diperhatikan. Sebab jika tidak segera diatasi akan mempengaruhi roda perekonomian yang juga akan berjalan lambat, akibatnya daerah ini tidak mampu menghadapi Negara luar.

Hambatan lainnya adalah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Hingga periode Februari 2019, 2,48% penduduk yang bekerja dengan pendidikan Diploma I/II/III, 631.694 orang atau sekitar (42,29%), berpendidikan SD ke bawah ("Kajian Ekonomi Regional," 2018) (Februari 2019: Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Tengah Sebesar 3,54 Persen, 2019).

Grafik 1
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan



Sumber: BPS, 2018 (olah data peneliti 2019)

Berdasarkan data Bank Indonesia, dari segi ketenagakerjaan Sulawesi Tengah mengalami penurunan.

Tabel 4
Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2014 – 2019 (Periode Februari)

Kegiatan Utama	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	1 427 819	1 426 527	1 494 757	1 557 099	1 570 386	1.548.639
Bekerja	1 386 103	1 383 919	1 443 060	1 510 782	1 520 304	-
Penganggur	41 716	42 608	51 697	46 317	50 082	-
Bukan Angkatan Kerja	560 982	605 408	575 544	550 900	572 570	-
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,79	70,21	72,20	73,87	73,28	-

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,92	2,99	3,46	2,97	3,19	3,54
----------------------------------	------	------	------	------	------	------

Sumber: BPS 2014-2019, (olah data peneliti, 2019)

Hingga Februari 2019 angkatan kerja sedikit mengalami penurunan (1.548.639 jiwa). Pada 2018, jumlah angkatan kerja mencapai 1,57 juta jiwa dibanding pada 2017 di bulan yang sama sekitar 1,55 juta orang. Akan tetapi partisipasi angkatan kerja yang mencapai 73,87% turun menjadi 73,28%, sehingga jumlah pengangguran naik menjadi 50,082 orang (3,19%) pada Februari 2018 dibanding 2017 yang hanya tercatat 46,317 orang. Akibatnya pada 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,19% dari 2,97% (2017), dan TPT kembali meningkat pada 2019 hingga 3,54% ("Kajian Ekonomi Regional," 2018) ("Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah," 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM provinsi ini masih terbilang rendah. Ketika tingkat pendidikan yang diperoleh semakin tinggi maka akan bersinergi terhadap inovasi untuk menciptakan atau menghadirkan lapangan pekerjaan yang baru. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan yang rendah kemampuan untuk berinovasi juga lemah, akibatnya peluang untuk terciptanya pengangguran lebih terbuka sehingga menambah tingkat kemiskinan dan akan menjadi beban bagi pemerintah.

KESIMPULAN

Secara garis besar Sulawesi Tengah sementara memainkan perannya sebagai aktor dalam perdagangan bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tidak hanya keterlibatan pemerintah melainkan dibutuhkan kerjasama mulai dari masyarakat, swasta, hingga akademisi untuk mengambil peran dalam menyiasati peluang dan sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

Daerah ini memiliki peluang dari beragamnya potensi sumber daya alam (migas dan *non migas*) yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota tentunya memberi harapan bagi pelaksanaan *free trade*

sehingga perekonomian provinsi ini akan meningkat. Akan tetapi kekhawatiran yang muncul ketika ekspor terus menerus dilakukan produksi dalam negeri kian menipis, belum lagi ekosistem akan rusak akibat eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Sementara regulasi atau aturan-aturan terkait dari pusat maupun daerah belum kuat untuk melindungi dan menjamin ketersediaan potensi sumber daya alam. Maka dari itu terwujudnya sinergitas pemerintah untuk menciptakan sumber ekspor baru sebagai alternative ekspor kedepannya sangat dinantikan.

Selain itu, penataan infrastruktur fisik maupun non fisik harus dibenahi sebab dengan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi pembangunan keberlanjutan. Sejalan dengan itu, lapangan pekerjaan yang kian terbuka tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran akan semakin sedikit melainkan malah bertambah disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Sehingga harapan kedepannya pemerintah bersama *stakeholder* membenahi kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja dengan pendidikan yang layak dapat bersinergi dan memiliki daya saing baik skala nasional terlebih di skala internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Arifiyanto dwi febr, & taufik, k. (2014).

Akuntabilitas pengelolaan alokasi.

Jurnal riset akuntansi dan keuangan, 2(3).

[Http://ejournal.upi.edu/index.php/jrak](http://ejournal.upi.edu/index.php/jrak)

Bank indonesia. 2018. Kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi sulawesi tengah periode agustus 2018.

[Https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-](https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-)

regional/sulteng/pages/kajian-ekonomi-dan-keuangan-regional-provinsi-sulawesi-tengah-periode-agustus-2018.aspx

Fadli, m. (2014). Optimalisasi kebijakan ketenagakerjaan dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean 2015. *Jurnal rechtsvinding*, 3(2).

Mantau, z. (2016). Daya saing komoditas jagung indonesia menghadapi eramasyarakat ekonomi asean. *Jurnal litbang pertanian*, 35(2). <https://doi.org/10.21082/jp3.v35n2.2016.p89-97>

Book

Arifin, s., rae, d.e., charles p.r.joseph, 2004. Kerjasama perdagangan internasional. Peluang dan tantangan bagi indonesia. Pt elex media komputindo, jakarta.

Dewi, rahayu kusuma, 2016. Studi analisis kebijakan. Pustaka setia bandung, bandung.

Februari 2019: tingkat pengangguran terbuka sulawesi tengah sebesar 3,54 persen, 2019. Badan pusat statistik sulawesi tengah, sulawesi tengah.

Hadiwinata, b.s., 2002. Politik bisnis internasional, 5th ed. Kanisius, yogyakarta.

Provinsi sulawesi tengah dalam angka 2018, 2018. Bps provinsi sulawesi tengah, palu.

Susilo, y.s., 2010. Strategi meningkatkan daya saing umkm dalam menghadapi implementasi cafta dan mea. Buletin ekonomi 8, 170–170.

Taufiqurakhman, 2014. Kebijakan publik. Pendelegasian dan tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan, 1st ed. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas moestopo beragama (pers), jakarta.

Wangke, h., 2014. Peluang indonesia dalam masyarakat ekonomi asean 2015. Info singkat hubungan internasional vi.

penelitian kualitatif.

[Ttps://www.djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id)

Bps. 2018. Indikator makro sosial ekonomi provinsi sulawesi tengah. Badan pusat statistik provinsi. <https://sulteng.bps.go.id/publication/indikator-makro-sosial-ekonomi-provinsi-sulawesi-tengah-triwulan-iii-2018.html>

Bps. 2019. Tingkat pengangguran terbuka sulawesi tengah sebesar 3,54 persen. <https://sulteng.bps.go.id>

Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. 2018. <http://bbs.binus.ac.id>

Kemendag. 2019. Neraca perdagangan indonesia total. Kementrian perdagangan republik indonesia. <http://www.kemendag.go.id>

Masyarakat ekonomi asean 2025. Direktorat jenderal perundingan perdagangan internasional. <http://ditjenppi.kemendag.go.id>

Newspaper

Arfan, m., 2011a. Sektor pertanian dan perkebunan.

<http://www.sultengprov.go.id/potensi-daerah/sector-pertambangan-dan-energi>

Arfan, m., 2011b. Sektor perikanan dan kelautan.

<http://www.sultengprov.go.id/potensi-daerah/sector-pertambangan-dan-energi>

Arfan, m., 2011c. Sektor pertambangan dan energi.

<http://www.sultengprov.go.id/potensi-daerah/sector-pertambangan-dan-energi>

Nadjemuddin, adha. 2017. Permintaan bawang goreng tinggi di dubai-hongkong.

<https://www.antaraneews.com>

Online article

Ardiyanto yoni. 2019. Memahami metode